

Profil Alumni Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Mataram

Joni Rokhmat^{1-a}, Wildan^{1-b}, Sukardi^{1-c}

¹Program study of Educational Administration Postgraduate, Mataram University

Email: 1-a:joni.fkip@unram.ac.id, 1-b:wildanfkip@unram.ac.id, 1-c:sukardi@unram.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menyusun profil alumni program studi Magister Administrasi Pendidikan (MAP). Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran eksploratori melalui tahap eksplorasi, pengembangan instrumen, pengambilan data, proses kuantisasi, proses analisis dan interpretasi. Sebagai populasi seluruh alumni prodi MAP (38 orang) sedangkan sampel adalah seluruh alumni yang mengembalikan angket yang telah diisi (18 orang, 12 di antaranya laki-laki) baik secara *online* maupun *offline*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa alumni prodi MAP sudah bekerja di institusi kependidikan dengan tiga posisi utama, yaitu pemimpin, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, serta sebagian kecil bekerja sebagai pengawas bidang pendidikan. Dalam rangka pengembangan prodi MAP, para alumni menyampaikan saran-saran untuk penyempurnaan penyelenggaraan program studi. Saran-saran tersebut meliputi peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan, serta pengaturan kembali kurikulum, seperti penetapan judul tesis, reorientasi capaian pembelajaran, dan durasi kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Kata Kunci: *Profil alumni, posisi pekerjaan, kualitas fasilitas dan layanan*

PENDAHULUAN

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bahwa capaian pembelajaran diartikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Berdasar kelompok kualifikasi KKNI tersebut, lulusan program studi magister (jenjang S1) berada pada kelompok terakhir, yaitu kelompok ahli dengan jenjang kualifikasi tingkat 7 hingga 9 (terakhir) dengan catatan pada jenjang program studi ini, kualifikasi KKNI tingkat 8 menjadi kualifikasi kompetensi minimal yang harus dikuasai para lulusan tersebut.

Dalam perpres tersebut, dideskripsikan masing-masing jenjang kualifikasi KKNI. Dengan kompetensi setara jenjang kualifikasi KKNI tingkat delapan (8) lulusan program studi magister diharapkan memiliki kemampuan dalam: (1) **mengembangkan** pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, (2) **memecahkan** permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner, dan (3) **mengelola** riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Sementara, jenjang kualifikasi KKNI tingkat sembilan (9) lulusan program studi magister diharapkan memiliki kemampuan dalam: (1) **mengembangkan**

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, **original**, dan teruji, (2) **memecahkan** permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner, serta (3) **mengelola**, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional (Perpres RI Nomor 8, 2012).

Berpedoman pada kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang lulusan program magister pada perpres di atas, yaitu jenjang kualifikasi KKNI nomor delapan (8), lulusan program studi magister administrasi pendidikan sudah sepatutnya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), memecahkan permasalahan iptek, serta mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan iptek yang implementasinya memberi manfaat bagi kehidupan manusia, khususnya pada bidang yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pendidikan. Penjabaran deskripsi tersebut, lulusan program studi magister administrasi pendidikan seyogyanya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan pendidikan, mampu menganalisis masalah hingga menentukan strategi penyelesaiannya dalam pengelolaan pendidikan, serta mampu mengelola pelaksanaan pendidikan tersebut, termasuk berkompeten memimpin suatu lembaga pendidikan.

Namun demikian, kesempurnaan capaian lulusan harus ditunjang oleh kesempurnaan situasi lingkungannya. Sementara, untuk membangun lingkungan akademik yang sempurna bagi para mahasiswanya hampir tidak pernah dapat terwujud. Dengan dasar tersebut, lulusannya pun tidak dapat dijamin sepenuhnya memiliki kompetensi ideal sebagaimana diharapkan dalam perpres di atas. Selanjutnya, dengan kondisi kompetensi lulusan yang dimiliki ini dimungkinkan bagi lulusan tersebut tidak semua terserap dalam dunia pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang ditekuninya, yaitu administrasi pendidikan.

Administrasi pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar proses penyelenggarannya dapat berjalan dengan baik. Seperti pada pendefinisian administrasi, dalam pengembangan definisi administrasi pendidikan, Suharsaputra (2013) dan Prihatin (2014) juga mendasarkan pada enam ahli yang sama, yaitu Satori, D. (1980), Pidarta, M. (1988), Biro Perencanaan Depdikbud (1993), Castetter (1996), Atmodiwirjo, S. (2000), dan pada Engkoswara (2001). Secara umum, keenam ahli di atas mengaitkan administrasi pendidikan dengan proses kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan, aktivitas yang memadukan sumber-sumber pendidikan, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, proses sosial, serta suatu ilmu untuk menata sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif, dan penciptaan suasana baik bagi manusia dalam mencapai tujuan bersama.

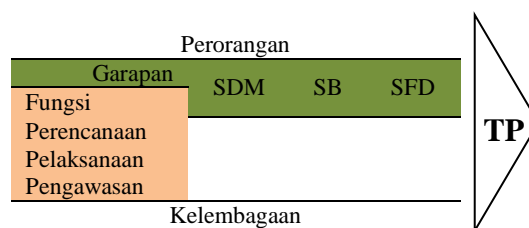
Berdasar pada sejumlah unsur yang dikaitkan dengan administrasi pendidikan sebagaimana disebutkan dalam alinea di atas, Suharsaputra (2013: 13) mengemukakan definisi administrasi pendidikan secara lebih operasional yaitu sebagai upaya seorang pemimpin dalam menggerakkan bawahan untuk mengelola sumber daya yang selalu terbatas untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Sementara, pendapat Prihatin (2014) dapat dimaknai bahwa administrasi pendidikan merupakan bentuk penerapan administrasi untuk mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya pendidikan, serta menerapkan fungsi administrasi untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumber daya guna mencapai tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu.

Dalam penelitian ini, pengembangan definisi administrasi dilakukan dengan mendasarkan dua alinea di atas yang dipandang memiliki dasar konseptual yang cukup representatif. Dalam konteks dunia pendidikan yang meliputi lembaga sekolah

maupun lembaga lain yang mengelola kegiatan kependidikan, administrasi pendidikan diartikan sebagai segala upaya komprehensif yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara optimal melalui pemanfaatan seluruh sumber daya pendidikan yang ada. Pemanfaatan sumber daya pendidikan dapat dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya manusia yang ada serta sumber daya fasilitas dan pembiayaan secara efektif dan efisien.

Lingkup administrasi pendidikan secara sederhana dapat diartikan seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, Suharsaputra (2013) menyatakan bahwa lingkup administrasi pendidikan ditentukan oleh tiga sudut pandang, yaitu sudut pandang proses, esensi atau substansi, atau sudut pandang substansi kerja. Sudut pandang proses berkaitan dengan empat fungsi administrasi, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sementara, sudut pandang esensi atau substansi berkaitan dengan bidang-bidang yang menjadi fokus administrasi, antara lain kepemimpinan, kinerja pegawai, penjaminan kualitas, iklim, dan budaya organisasi. Terakhir, berkenaan dengan substansi kerja, administrasi pendidikan berkaitan langsung dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan dunia pendidikan, antara lain organisasi sekolah atau lembaga pendidikan, pembiayaan pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, fasilitas pendidikan, kinerja guru, serta proses pembelajarannya.

Selanjutnya, Suharsaputra (2012) berdasar pada paparan di atas, ia menyederhanakan kajian administrasi pendidikan baik dalam tataran makro (kebijakan), tataran meso (manajerial), maupun tataran mikro (pembelajaran). Menurutnya, kajian administrasi pendidikan memiliki modus sebagai kombinasi antar sudut pandang. Hal ini sejalan dengan pendapat Engkoswara yang direpresentasikan dalam bentuk Gambar 1.



Keterangan: SDM = Sumber daya manusia, SB = Sumber belajar, SFD = Sumber fasilitas dan dana, serta TPP = Tujuan Pendidikan secara Produktif.

Gambar 1. Lingkup Administrasi Pendidikan (Engkoswara, 2001 dalam Suharsaputra, 2013)

Gambar 1 memperlihatkan peluang kombinasi lingkup administrasi antara fungsi administrasi dalam sudut pandang proses dengan bidang garapan dalam sudut pandang substansi kerja. Dari gambar tersebut, dalam konteks kelembagaan pendidikan, lingkup administrasi pendidikan mencakup domain yang lebih luas dan

bidang-bidang yang harus ditangani juga menjadi lebih banyak dan kompleks, dari sumber daya fisik, keuangan, dan manusia yang terlibat dalam lembaga pendidikan terkait.

Murphy dan Louis (1999) sebagaimana dikutip oleh Suharsaputra (2013) dan Prihatin (2014) menyatakan bahwa menurut *consortium on renewing education*, suatu lembaga pendidikan memiliki lima modal yang perlu dikelola. Kelima modal tersebut adalah modal integratif, manusia, pendanaan, sosial, serta modal politik.

Modal integratif berintegrasi empat modal lainnya supaya dapat dimanfaatkan dalam upaya pencapaian program atau tujuan pendidikan. Selanjutnya, modal manusia adalah sumber daya manusia dengan kemampuannya untuk digunakan untuk keperluan proses pendidikan. Modal pendanaan merupakan dana yang diperlukan untuk menjalankan dan memperbaiki proses pendidikan. Dua modal lainnya, modal sosial yaitu ikatan kepercayaan dan kebiasaan yang merepresentasikan lembaga pendidikan secara umum sebagai komunitas. Terakhir, modal politik menjadi dasar otoritas legal yang diperlukan untuk melakukan proses pendidikan.

Mengacu pada pendapat Prihatin (2014), administrasi pendidikan secara lebih umum dapat dimaknai memiliki tujuh garapan utama. Ketujuh garapan tersebut adalah (1) administrasi tata laksana, (2) organisasi personal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, (3) administrasi peserta didik, (4) supervisi pembelajaran, (5) pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, (6) pendirian dan perencanaan fasilitas lembaga pendidikan, serta (7) hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat.

Bidang garapan administrasi tatalaksana dalam suatu lembaga pendidikan mencakup Sembilan unsur. Unsur-unsur tersebut adalah organisasi dan struktur pegawai administrasi, otorisasi dan anggaran belanja lembaga, masalah kepegawaian dan kesejahteraan personal, masalah perlengkapan dan perbekalan, keuangan dan pembukuannya, korespondensi, laporan-laporan, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, dan pemberhentian pegawai, serta masalah pengisian buku pokok, klapper, rapor, dan sebagainya.

Selanjutnya, bidang garapan kedua dan ketiga, administrasi personal tenaga pendidik dan kependidikan serta administrasi peserta didik, masing-masing memiliki enam dan empat unsur. Unsur untuk garapan kedua meliputi pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik, organisasi personal tenaga pendidik, kepegawaian dan kesejahteraan pendidik, rencana orientasi tenaga pendidik baru, kondisi dan penilaian kemajuan pendidik, serta *inservice training* dan *up-grading* pendidik. Sementara, garapan ketiga mencakup unsur organisasi dan perkumpulan peserta didik,

masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik, serta bimbingan dan penyuluhan peserta didik.

Garapan keempat, supervisi pembelajaran, memiliki lima unsur, yaitu: (a) usaha membangkitkan dan merangsang semangat pendidik dan pegawai, (b) mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode pembelajaran baru yang lebih baik, (c) mengusahakan dan mengembangkan kerjasama antara pendidik, peserta didik, dan pegawai, (d) mengusahakan cara menilai hasil pendidikan, serta (e) usaha mempertinggi mutu dan pengalaman pendidik. Sementara, garapan kelima, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, mencakup tiga unsur, yaitu: (a) menjadikannya sebagai pedoman dan merealisasikan kurikulum, (b) menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum secara lengkap, serta (c) menjadikan kurikulum sebagai pedoman dalam menjalankan pendidikan.

Garapan keenam administrasi pendidikan, pendirian dan perencanaan fasilitas lembaga pendidikan, memiliki enam unsur. Keenam unsur tersebut mencakup (a) penentuan letak dan luas tanah yang dibutuhkan, (b) usaha, perencanaan, dan penggunaan biaya pendirian fasilitas lembaga, (c) penentuan jumlah dan luas setiap komponen ruang dan komposisi antar ruang tersebut, (d) tatacara penggunaan fasilitas, (e) penentuan perlengkapan dan peralatan pendidikan yang dibutuhkan, serta (f) keterhubungan kelima unsur di atas dengan kurikulum dan dengan kemajuan masyarakat sekitar dan perkembangan jumlah peserta didik.

Garapan terakhir, hubungan lembaga dengan masyarakat mencakup hubungan antar lembaga itu dengan lembaga lain di sekitarnya, lembaga dengan pemerintah setempat, lembaga dengan lembaga lain non pendidikan, serta hubungan lembaga itu dengan masyarakat secara umum. Hubungan ini merupakan hubungan kerja sama yang bersifat akademik, pedagogik, sosiologis, dan hubungan konstruktif yang mampu mendatangkan keuntungan dan perbaikan, serta kemajuan kedua pihak.

Prihatin (2014) menyatakan bahwa administrasi pendidikan memiliki sembilan fungsi. Kesembilan fungsi tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengkomunikasian, supervise, kepegawaian, pembiayaan, dan penilaian. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan fungsi manajemen sebagaimana dinyatakan oleh Terry (2013), fungsi administrasi pendidikan dapat ditafsirkan memiliki lima unsur, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pemotivasian, dan pengawasan. Dengan menggunakan irisan dari dua pendapat di atas, dapat dirangkum bahwa unsur administrasi menganut lima unsur dari pendapat kedua mengingat bahwa pecahan unsur pada bagian

pertama dapat dinyatakan sebagai bagian dari yang pertama.

Perencanaan merupakan syarat mutlak dalam setiap kegiatan administrasi, termasuk administrasi pendidikan dan bagian ini dilakukan pada awal dari setiap kegiatan. Perencanaan itu sendiri memiliki dua faktor, yaitu tujuan dan sarana, baik sarana personal maupun material. Prihatin (2014) menyebutkan setidaknya terdapat lima langkah dalam perencanaan, yaitu: (a) menentukan dan merumuskan tujuan, (b) meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, (c) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, (d) menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan, dan (e) merumuskan bagaimana masalah itu akan dipecahkan. Sementara, Terry (2013) membagi unsur perencanaan kedalam delapan bagian yang dapat dimaknai bahwa perencanaan mencakup: (a) *self audit*, (b) survei lingkungan, (c) menentukan tujuan, (d) memprediksi keadaan, (e) melakukan tindakan, (f) melakukan evaluasi, (g) melakukan perbaikan dan penyesuaian, serta (h) berkomunikasi selama proses perencanaan.

Selanjutnya, paparan sub unsur dari fungsi administrasi lebih diorientasikan pada pendapat Terry (2013). Unsur kedua, pengorganisasian, memiliki delapan bagian. Kedelapan bagian tersebut dapat dimaknai mencakup: (a) identifikasi, yaitu penetapan dan penentuan pekerjaan, (b) membagi pekerjaan-pekerjaan menjadi tugas setiap orang, (c) penetapan tugas-tugas kelompok sebagai posisi, (d) penentuan persyaratan setiap posisi, (e) penentuan kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan berhubungan satu dengan lainnya, (f) membagi pekerjaan, tanggung jawab, dan cakupan kekuasaan, (g) menentukan perubahan dan penyesuaian organisasi berdasar hasil pengawasan dan perubahan kondisi, dan (h) berkomunikasi selama mengorganisasikan.

Unsur ketiga, kepegawaian, dibagi kedalam enam bagian. Keenam bagian tersebut dapat dimaknai meliputi: (a) penentuan keperluan sumber daya, (b) pengerahan pegawai, (c) melakukan penyeleksian, (d) melatih dan mengembangkan potensi sumber daya manusia, (e) menentukan perubahan dan penyesuaian kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berdasar hasil pengawasan dan perubahan kondisi, serta (f) berkomunikasi selama mengatur kepegawaian.

Selanjutnya, unsur keempat, pemotivasian, dibagi kedalam delapan bagian. Kedelapan bagian tersebut dapat dimaknai terdiri dari: (a) melakukan hubungan dengan bawahan dan menjelaskan tujuan pendidikan kepada bawahan, (b) memberitahukan ukuran atau standar pelaksanaan, (c) melatih dan membimbing bawahan untuk memenuhi standar pelaksanaan, (d) memberikan upah berbasis pelaksanaan, (e) memberi pujian atau teguran dengan jujur, (f) menciptakan lingkungan kerja yang

konduif, (g) melakukan perubahan dan penyesuaian cara untuk memotivasi, serta (h) berkomunikasi selama proses pemotivasian.

Terakhir, unsur pengawasan dibagi menjadi lima bagian. Kelima bagian itu dapat ditafsirkan mencakup: (a) penetapan standar, (b) memonitor dan membandingkan hasil dengan standar, (c) memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, (d) melakukan perubahan dan penyesuaian cara pengawasan, dan (e) berkomunikasi sepama proses pengawasan

Perumusan masalah dilakukan dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi: (1) bahwa berdasar pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) lulusan program studi magister dikelompokkan sebagai ahli dengan kompetensi jenjang kualifikasi kategori 7 hingga 9, (2) bahwa jenjang kualifikasi minimal bagi lulusan program studi magister adalah pada kategori 8, (3) bahwa kemampuan lulusan dengan jenjang kualifikasi 8 meliputi kemampuan **mengembangkan** pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, **memecahkan** permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner, dan **mengelola** riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional, dan sesuai dengan bidang keilmuan administrasi pendidikan, (4) bahwa lulusan program studi magister administrasi sepatutnya memiliki kemampuan: (a) **mengembangkan** pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang administrasi pendidikan atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, (2) **memecahkan** permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang administrasi pendidikan melalui pendekatan inter atau multidisipliner, dan (3) **mengelola** riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional di bidang administrasi pendidikan.

Rumusan masalah: Atas dasar empat pertimbangan tersebut, disusun tiga rumusan masalah dalam penelitian adalah: (1) Bagaimana kontribusi lulusan program studi magister administrasi pendidikan dalam mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang administrasi pendidikan atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji? (2) Bagaimana kontribusi lulusan program studi magister administrasi pendidikan dalam **memecahkan** permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di

dalam bidang administrasi pendidikan melalui pendekatan inter atau multidisipliner? **dan** (3) Bagaimana kontribusi lulusan program studi magister administrasi pendidikan dalam **mengelola** riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional di bidang administrasi pendidikan?

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran eksploratori melalui tahapan eksplorasi, pengembangan instrumen, pengambilan data, kuantisasi data, serta tahap analisis dan interpretasi. Tahap eksplorasi diorientasikan menggali informasi kerangka konseptual dan kategori kerja pada bidang administrasi pendidikan. Pengembangan instrumen pengambilan data, berupa angket penelusuran alumni. Pengambilan data dilakukan secara langsung maupun menggunakan media komunikasi elektronik. Proses kuantisasi dilakukan untuk mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Terakhir, proses analisis, dan interpretasi meliputi display data dan penafsiran makna dari data yang diperoleh. Sebagai populasi seluruh alumni prodi MAP dari awal hingga semester genap tahun ajaran 2016/2017 yang terjangkau oleh proses komunikasi langsung maupun melalui media elektronik, dan diperoleh sebanyak 38 orang. Sementara, sampel adalah seluruh alumni yang mengembalikan angket yang telah diisi, yaitu sebanyak 18 orang, 12 di antaranya laki-laki. Data yang didapat dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini ditampilkan dalam tiga bagian, yaitu: 1) Profil kinerja alumni program studi Magister Administrasi Pendidikan (prodi MAP); 2) Rencana implementasi keilmuan hasil kuliah bagi para alumni prodi MAP; dan 3) Saran atau komentar para alumni prodi MAP untuk menyempurnakan kurikulum prodi MAP. Secara lebih rinci, hasil ini disajikan dalam Tabel 1 hingga Tabel 4.

Tabel 1. Persentase Jawaban terhadap Angket ANGKET, NOMOR

Atribut	1		2		3	
	Y	T	J-1	J-2	J-1	J-2
Persentase	94	6	83	11	89	6

Atribut	4				
	J-1	J-2	J-3	J-4	J-5
Persentase	6	22	6	33	33

Atribut	5			6		
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-1	P-2
Persentase	28	61	0	0	33	28

Atribut	6			7		
	P-3	P-4	P-5	P-6	P-1	P-2
Persentase	83	11	89	6	6	22

Persentase	22	6	0	11	94	6
Atribut	7		8		9	
	P-3	P-1	P-2	P-3	P-1	P-2
Persentase	83	11	89	6	6	22

Atribut	9		10		11	
	P-3	J-1	J-2	J-1	J-2	
Persentase	6	83	28	56	72	

Tabel 2. Argumen Mengapa Belum Bekerja

Responden	Isian Angket No 1 (1)
8	Saya berasal dari Papua sehingga sebelum wisuda belum bisa kembali ke Papua. Hal ini mengakibatkan saya belum bisa menerima penawaran beberapa instansi untuk bekerja di sana.

Catatan: Hanya satu responden (dari 18 responden) yang memberi tanggapan ini.

Tabel 3. Rencana Implementasi Keilmuan Hasil Kuliah

Rsponden	Isian Angket No 1 (2)
1	Menerapkan teori organisasi, evaluasi dan supervisi, serta terus aktif dalam membuat karya ilmiah di bidang saya
8	Beberapa rencana yang ingin saya lakukan: (1) Pembenahan proses pembelajaran di papua dengan cara (a) menciptakan calon pendidik yang benar-benar memiliki kemampuan sebagai pendidik, (b) menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan karakter masyarakat Papua. selain itu; (2) Untuk menyempurnakan keilmuan di bidang AP saya memiliki rencana melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga keilmuan yang saya miliki dapat lebih sempurna dalam melakukan berbagai pembenahan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan di Papua.
11	Saya akan mencoba merubah cara yang sebelumnya tidak sesuai dengan aturan administrasi secara bertahap. Kita akan sesuaikan menurut aturan-aturan terutama dalam pengelolaan program pembelajaran
13	Menerapkannya di dalam melakukan manajemen di sekolah.
15	Implementasinya: mengelola administrasi sekolah dengan baik dan menjalankan sistem penjaminan mutu internal pada standar nasional pendidikan.
16	Menjadi seorang manajer dalam ilmu / bidang pendidikan, mengikuti dinamika, serta dapat mempersiapkan generasi muda untuk menyongsong abad XXI.
17	Berusaha melakukan perbaikan sistem yang lebih baik di tempat bekerja.
18	Rencana evaluasi sistem / tata laksana administrasi kepegawaian dan administrasi umum.

Catatan: Hanya delapan responden (dari 18 responden) yang memberi tanggapan ini.

Tabel 4. Komentar Alumni untuk Penyempurnaan Kurikulum Program Studi MAP Unram

Responden	Komentar
1	(1) Jumlah mahasiswa dalam satu kelas diperkecil; (2) Penetapan dan pelaksanaan tugas akhir/tesis ditentukan dari semester satu sehingga mahasiswa bisa lulus tepat waktu; dan

Responden	Komentar
	(3) Mata kuliah diperbanyak.
2	Sudah baik
	(1) Saya merasakan kurikulum yang digunakan sudah bagus, namun perlu peningkatan di sesuaikan dengan kebutuhan prodi, terutama materi yang berkaitan dengan metodologi pendidikan, asesmen pendidikan, yang langsung dapat diterapkan di sekolah masing-masing guna peningkatan mutu pendidikan;
3	(1) Waktu penentuan PPL dan penetapan judul tesis mahasiswa bisa disesuaikan untuk tidak menjadi salah satu menghambat mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir; (2) Kebijakan prodi untuk dapat independen karena banyak keputusan yang berubah seperti tahun 2016 mahasiswa belum lulus toefel bisa ujian tesis tetapi tahun 2017 mahasiswa harus lulus toefel lebih dahulu, Kebijakan ini merugikan mahasiswa sebaiknya segala regulasi diputuskan lebih awal dan berlaku hingga mahasiswa tersebut selesai.
3	(1) Waktu penentuan PPL dan penetapan judul tesis mahasiswa bisa disesuaikan untuk tidak menjadi salah satu menghambat mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir; (2) Kebijakan prodi untuk dapat independen karena banyak keputusan yang berubah seperti tahun 2016 mahasiswa belum lulus toefel bisa ujian tesis tetapi tahun 2017 mahasiswa harus lulus toefel lebih dahulu, Kebijakan ini merugikan mahasiswa sebaiknya segala regulasi diputuskan lebih awal dan berlaku hingga mahasiswa tersebut selesai.
4	(1) Perlu diberi proporsi waktu untuk praktik setiap mata kuliah yang bersifat ilmu terapan; (2) Diadakan studi banding yang terprogram dengan baik ke perguruan tinggi yang sudah diakui kualitasnya oleh pemerintah; (3) Ketersediaan sarana kuliah yang lebih baik lagi.
5	Kurikulum harusnya memberikan pengalaman belajar dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang sejalan dengan pengembangan manusia seutuhnya.
6	(1) Perdalam pengetahuan dan keterampilan lulusan dengan hal-hal yang bersifat praktis dan berbasis IT; (2) Networking planning; (3) Perbanyak teori dan praktek pada administrasi pendidikan.
7	(1) Materi perkuliahan agar lebih aplikatif membahas permasalahan dunia pendidikan dan di tempat tugas khususnya; (2) Tugas mahasiswa agar lebih diarahkan menuju berbasis IT dan jaringan, dan (3) Diharapkan program studi MAP memiliki jurnal ilmiah tingkat nasional yang bisa menampung karya ilmiah mahasiswa maupun alumni.
8	(1) Peningkatan porsi mengajar pada dosen AP menurut saya setelah mengikuti perkuliahan di kelas selama 1,5 tahun, terdapat beberapa mata kuliah yang perlu diajarkan oleh dosen yang memiliki latar belakang pendidikan AP. Hal ini dikarenakan sebagai calon megister, mahasiswa bukan hanya sekedar belajar melalui teori yang dikemukakan tetapi melalui pengalaman yang pernah dialami dosen; (2) Dalam tuntutan KKNi nomor 5, mahasiswa untuk dapat menyelesaikan masalah AP melalui melalui berbagai sudut pandang. Menurut saya selama belajar di prodi MAP Unram, belum memperoleh pengalaman untuk mencapai tuntutan tersebut. Padahal tuntutan tersebut dapat diperoleh ketika melakukan praktek kerja lapangan (PKL). Kegiatan PKL yang dilakukan sebaiknya disempurnakan sehingga mahasiswa, khususnya yang belum bekerja dapat dihadapkan secara langsung dengan masalah administrasi yang terjadi di sebuah instansi

Responden	Komentar
	dan dapat memecahkan masalah tersebut. Intinya bahwa kegiatan PKL yang dilakukan selama satu minggu, kurang efektif untuk mencapai tuntutan KKNi pada butir 5;
	(3) Perlu adanya mata kuliah yang dikaitkan dengan inovasi pendidikan. Hal ini dikarenakan sebagai akademisi, lulusan Prodi MAP juga adalah seorang peneliti.
8	Karenanya, mahasiswa perlu diperkenalkan dengan berbagai inovasi yang dapat mengembangkan sistem pendidikan yang ada dan kemudian akan membawa kemajuan pendidikan.
9	Adanya sistem tugas yang terintegrasi sebagai syarat mutlak kelulusan mata kuliah yang ditempuh.
10	Agar fasilitas lebih diperhatikan
11	Penyempurnaa kurikulum di UNRAM sudah baik tapi supaya lebih baik lagi perlu di tingkatkan dalam hal pelayanan di dalam kampus UNRAM
12	(1) Kegiatan pembelajaran / perkuliahan agar lebih banyak pada kegiatan pemecahan masalah / kasus-kasus (problem dalam bidang pendidikan); dan (2) Ketertiban dan kedisiplinan kegiatan supaya ditingkatkan.
13	Lebih menekankan pada mata kuliah tentang inovasi bidang pendidikan.
14	Penyusunan proposal mohon sudah diberikan kepada mahasiswa dari semester awal karena seringkali menjadi kendala bagi mahasiswa dalam menyusun tesis.
15	Penyempurnaan kurikulum pada program MAP harus ditambah terutama pada mata kuliahnya yang terasa belum sesuai dengan program.
16	Disesuaikan dengan perkembangan, terutama dalam mata kuliah yang berbasis TIK / IT.
17	Untuk mata kuliah statistik agar diberikan di awal dengan sks yang lebih
18	MAP hendaknya secara lebih spesifik membuka pelatihan (kuliah) umum tentang administrasi penggunaan dana pendidikan (menetapkan sebagai mata kuliah / semester).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa dari seluruh responden yang mengembalikan (mengisi) angket melalui surat elektronik maupun yang mengisi secara langsung, dengan membandingkan data tersebut dengan isi dari angket, didapat bahwa hampir seluruh alumni program studi Magister Administrasi Pendidikan (prodi MAP) sudah bekerja (94%) dengan tempat bekerja mayoritas pada instansi pemerintah (83%), serta pada bidang pendidikan (89%). Selanjutnya, dari seluruh alumni yang bekerja pada bidang pendidikan tersebut, mayoritas berada pada jenjang pendidikan menengah pertama (22%), pendidikan dasar (33%), dan pendidikan menengah atas (33%). Sisanya, terbagi pada jenjang pendidikan pra-sekolah (6%) dan perguruan tinggi (6%).

Didasarkan pada bidang dan posisi pekerjaannya, didapat bahwa alumni prodi MAP secara umum bekerja di bidang administrasi (28%) dan administrasi kependidikan (61%). Pada aspek posisi pekerjaannya, alumni prodi tersebut secara

umum menempati tiga posisi, yaitu sebagai pemimpin (33%), tenaga pendidik (28%), dan tenaga administrasi umum (22%). Sisanya, menempati dua posisi, yaitu sebagai wakil pimpinan (6%) dan pengawas (11%).

Berkenaan dengan perubahan kebiasaan dalam melakukan pekerjaan, para alumni prodi MAP menyatakan bahwa hampir seluruhnya melakukan pekerjaan rutinitas (94%). Namun demikian, juga hampir seluruh alumni melakukan pekerjaan yang berbeda dari jenis pekerjaan sebelum lulus S2 (83%) dan hanya sebagian kecil yang menjalankan pekerjaan yang sama dengan sebelum lulus S2 (6%). Dari sisi efisiensi dan penerapan sistem informasi (IT), hampir seluruh alumni prodi MAP menyatakan berusaha melakukan pekerjaan secara lebih efisien (89%). Hanya sebagian kecil yang menyatakan melakukan pekerjaan seperti biasanya (11%) dan mengubah pekerjaan menuju berbasis IT (6%). Ditinjau dari mekanisme pekerjaan, upaya menganalisis efektivitas dan efisiensi, serta dalam mengimplementasikan ilmu saat kuliah S2, hampir seluruh alumni prodi MAP melakukan analisis efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan (89%). Sisanya, hanya sebagian kecil yang menyatakan berhasil mengubah mekanisme pekerjaannya (11%) dan menggunakan ilmu saat S2 dalam menyelesaikan permasalahan (6%).

Dikaitkan dengan fungsi manajemen, para alumni menyatakan bahwa mereka menyusun rencana kerja di awal tahun atau semester (83%) dan merevisi pekerjaan tahunan atau semester tahun lalu (28%). Selain itu, mereka juga melakukan pengawasan proses kinerja (56%), serta mengevaluasi hasil pekerjaan yang telah dilakukan (72%).

Bagi alumni prodi MAP yang belum bekerja (6%), dapat dikatakan tidak memiliki alasan terkait dengan kesulitannya dalam mencari pekerjaan. Di sini, hanya seorang yang menyatakan alasan mengapa belum bekerja, yaitu berkaitan dengan domisili yang belum menetap. Domisili di tempat kuliah (Mataram), bersifat sementara karena setelah segala urusan akademik terselesaikan ia akan pindah ke tempat lain yang cukup jauh. Jadi mengapa tidak atau belum bekerja semata-mata dikarenakan yang bersangkutan memang menundanya (Tabel 2).

Tabel 3 menggambarkan rencana para alumni prodi MAP dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di kuliah S2. Dari tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk mengimplementasikan konsep manajerial yang didapat selama kuliah. Di antara rencana mereka adalah: melakukan evaluasi dan supervisi, serta menerapkan inovasi-inovasi fungsi administrasi. Selain itu, mereka juga berkeinginan

menjalankan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan standar nasional pendidikan, serta mencoba membuat karya ilmiah di bidangnya.

Terakhir, tabel 4 memaparkan saran-saran para alumni prodi map dalam menyempurnakan kurikulum penyelenggaraan program studi tersebut. saran-saran tersebut secara umum dapat dikelompokkan kedalam 15 kelompok, yaitu: (1) jumlah mahasiswa dalam kelas diperkecil, (2) penetapan tugas akhir (tesis) di semester satu, (3) menambah mata kuliah, metode penelitian/asesmen bersifat aplikatif di sekolah, (4) konsistensi kebijakan program pascasarjana dan pemberian otoritas program studi, (5) pemberian praktik bagi mata kuliah terapan, (6) pengaduan studi banding yang terprogram, dan (7) perbaikan sarana kuliah. delapan kelompok lainnya adalah: (8) pemberian pengalaman belajar yang dinamis sesuai dengan kebutuhan, (9) perkuliahan bersifat aplikatif, (10) tersedia jurnal ilmiah tingkat nasional pada program studi map, (11) praktek kerja lapangan (pkl) dilaksanakan dengan durasi waktu yang cukup (satu minggu tidak cukup), (12) pemberian tugas terintegrasi dalam setiap mata kuliah, (13) mendasarkan pembelajaran pada pemecahan masalah pendidikan, (14) peningkatan ketertiban dan kedisiplinan, dan (15) memasukkan administrasi penggunaan dana pendidikan sebagai mata kuliah.

Berdasarkan Tabel 1 dan jika ditinjau dari status pekerjaannya, alumni program studi Magister Administrasi Pendidikan (prodi MAP) hampir seluruhnya sudah bekerja pada instansi pemerintah di bidang pendidikan. Mereka tersebar pada tiga kelompok besar jenjang pendidikan, yaitu (dari persentase besar ke kecil) pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan dasar.

Dari sisi manajerial, para alumni prodi MAP sepertiga bagian bekerja sebagai seorang manajer. Sisanya, merupakan pelaksana administrasi pendidikan, yaitu sebagai tenaga pendidik dan tenaga administrasi, serta sebagian kecil sebagai wakil pimpinan dan pengawas. Jadi, secara umum, para alumni berkenaan dengan fungsi manajerial di bidang pendidikan, bekerja sebagai seorang manajer, pelaksana, dan pengawas atau pemonitor pendidikan. Jika ditinjau dari lingkup administrasi pendidikan (Suharsaputra, 2012), jenis pekerjaan para alumni prodi MAP mayoritas berada pada tatanan meso (manajerial) dan mikro (pembelajaran). Tatanan meso bagi mereka yang bekerja sebagai pimpinan suatu lembaga kependidikan sedangkan pada tatanan mikro bagi alumni yang bekerja sebagai tenaga pendidik. Tim peneliti menginterpretasikan alumni MAP yang bekerja pada tatanan makro administrasi pendidikan masih tergolong minoritas. Pada tatanan ini, khususnya bagi alumni yang bekerja sebagai

pembuat kebijakan pendidikan yang berdampak implementasi cukup luas.

Namun demikian, fakta di atas menunjukkan bahwa para alumni prodi MAP bekerja tergolong sesuai dengan fungsi manajemen sebagaimana dikemukakan oleh para tokoh, seperti Suharsaputra (2013) dan Prihatin (2014) yang mendasarkan pada tujuh pendapat ahli dan/atau kelompok ahli Lester Robert Bittel (1978), Atmosudirdjo, P. (1982), Boone dan Kurtz (1984), Harold Koontz dan Cyrill O'Donnel (tanpa tahun), Terry, G., R. (1986), Siagian, S., P. (1997), dan pada De Cenzo dan Robbin (1999). Dalam hal ini, bahwa pekerjaan para alumni prodi MAP memiliki fungsi administrasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

Berdasarkan Perpres RI nomor 8 tahun 2012 dan Tabel 4.1, alumni prodi MAP maunjukkan bahwa, paling tidak, sebagian kualifikasi KKNI tingkat delapan (8) sebagaimana kualifikasi keharusan bagi alumni program studi magister. Para alumni menyatakan bahwa selain melakukan pekerjaan rutinitas, mereka juga melakukan pekerjaan yang berbeda dari sebelumnya. Fakta ini sejalan dengan tuntutan minimal kualifikasi KKNI tingkat delapan (8). Indikator kualifikasi tersebut antara lain mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya, praktek profesionalnya melalui riset, menghasilkan karya inovatif, memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner, serta mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Secara praktis, para alumni menyatakan bahwa di instansi tempat bekerja, mereka melakukan pekerjaan yang berbeda dari sebelum lulus S2, berusaha melakukan pekerjaan secara lebih efisien, menganalisis efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan, menyusun rencana kerja di awal tahun atau semester, mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan, serta mengevaluasi hasil pekerjaan (Tabel 4.1). Untuk meningkatkan kinerja para alumni prodi MAP ke jenjang kualifikasi KKNI tingkat sembilan (9) pada dasarnya mereka perlu bekerja secara kreatif dan menunjukkan inovasi-inovasi baru. Kreativitas dan orisinalitas tersebut, dalam melakukan pekerjaannya, dapat diwujudkan dalam bentuk strategi dan metode, serta menggunakan pendekatan terintegrasi dari berbagai kajian disiplin ilmu (Perpres RI nomor 8 tahun 2012).

Ditinjau dari status pekerjaan, seluruh alumni yang mengembalikan angket dapat dikatakan sudah bekerja. Hanya sebagian kecil (6%) yang belum bekerja. Namun berdasar pada argumen yang

dibuat, status belum bekerja bukan karena tidak mampu mendapatkan pekerjaan tetapi memang belum siap bekerja dikarenakan domisili yang belum menetap (Tabel 2).

Berkenaan dengan rencana implementasi hasil kuliah di prodi MAP, setelah lulus, para alumni di instansi tempat mereka bekerja merencanakan kegiatan berikut: (1) menerapkan teori organisasi, evaluasi, dan supervisi, serta aktif mengembangkan karya ilmiah, (2) mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan karakter masyarakat, (3) melanjutkan kuliah ke jenjang doctoral, (4) melakukan inovasi strategi dan metode kerja, (5) menjalankan sistem penjaminan mutu internal, serta (6) menjalankan manajemen sesuai dengan dinamika kebutuhan (Tabel 3). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa para alumni menimplementasikan keilmuan manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, mereka juga berusaha melakukan inovasi-inovasi administrasi pendidikan yang mencakup perbaikan strategi dan metode implementasi administrasi pendidikan dengan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat di bidang tersebut. Beberapa di antaranya, juga berkeinginan melanjutkan studinya di bidang administrasi pendidikan pada jenjang doctoral.

Paparan di atas menggambarkan bahwa para alumni berusaha mengimplementasikan administrasi pendidikan sebagaimana didefinisikan oleh Suharsaputra (2013) dan Prihatin (2014) yang mendasarkan pada enam sumber dan/atau ahli yang sama, yaitu Satori, D. (1980), Pidarta, M. (1988), Biro Perencanaan Depdikbud (1993), Castetter (1996), Atmodiwirjo, S. (2000), dan pada Engkoswara (2001). Dalam hal ini, secara umum para alumni dalam mengimplementasikan ilmu administrasi pendidikan berusaha menjalankan proses kerjasama, serta memanfaatkan sumber daya dalam mencapai tujuan pendidikan.

Secara ideal, implementasi administrasi terkait dengan empat fungsi. Berkenaan dengan perencanaan, dalam menjalankan administrasi pendidikan perlu menyusun kebijakan, menetapkan tujuan, merancang program, menentukan dan mengalokasikan sumber daya, serta memodifikasi kebijakan dan rencana. Berkenaan dengan pengorganisasian perlu mengembangkan dan memodifikasi struktur organisasi, mengarahkan dan membangun harapan, memberi tugas dan menentukan bagian yang memerlukan pendelegasian, serta mengordinasi dan mendukung kontribusi (Turney, C. *et al.* 1992, sebagaimana dikutip oleh Suharsaputra, 2013).

Selanjutnya, berkenaan dengan pelaksanaan perlu menentukan tahapan secara berurutan. Namun demikian, dalam fungsi ini juga mencakup seluruh fungsi administrasi, yaitu perencanaan,

pengorganisasian, dan pelaksanaan itu sendiri, serta pengawasan (Terry, G., R., 2013 dan Suharsaputra, 2013). Terakhir, berkenaan dengan pengawasan, terdapat empat unsur, yaitu menyusun standar-standar pelaksanaan, mengarahkan kinerja pegawai, memonitor dan mengevaluasi perkembangan kinerja, serta melakukan koreksi apabila terdapat pelaksanaan-pelaksanaan yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan (Turney, C. *et al.* 1992, sebagaimana dikutip oleh Suharsaputra, 2013).

Meskipun pernyataan verbal para alumni prodi MAP tidak lengkap sesuai dengan kondisi ideal di atas, setidaknya terdapat irisan antara keduanya. Kata kunci dari irisan rencana kinerja alumni dengan kinerja ideal bidang administrasi pendidikan meliputi teori organisasi, evaluasi, supervisi, sistem pendidikan, inovasi strategi dan metode kerja, dan sistem penjaminan mutu. Jadi dapat diartikan bahwa para alumni prodi MAP melaksanakan unsur-unsur manajemen atau administrasi pendidikan sebagaimana dijelaskan secara konseptual oleh para ahli administrasi pendidikan.

Dalam rangka pengembangan prodi MAP, para alumni menyampaikan cukup banyak saran-saran konstruktif, khususnya terkait dengan pengembangan kurikulum. Secara garis besar, saran tersebut mencakup fasilitas, layanan, jumlah rombongan belajar, struktur kurikulum, penempatan (semester) mata kuliah, sifat mata kuliah, tugas-tugas mata kuliah, durasi Praktek Kerja Lapangan (PKL), ketertiban, kedisiplinan, independensi prodi MAP, sistem penjaminan mutu, dan pelatihan administrasi pendidikan, serta jurnal ilmiah mandiri.

Dalam hal fasilitas dan layanan, para alumni mengeluhkan bahwa saat mereka berkuliah fasilitas yang mencakup ruang kuliah, perpustakaan, hingga tempat ibadah (mushola atau masjid) dan kamar kecil. Selanjutnya, layanan mencakup administrasi akademik dan kemahasiswaan. Sebagian dari para alumni, terkait dengan rombongan belajar, mengusulkan agar jumlah mahasiswa per kelasnya diperkecil (penafsiran peneliti, maksimum 15 mahasiswa per kelas).

Terkait struktur kurikulum, mahasiswa mengusulkan hal-hal yang dapat ditafsirkan sebagai berikut: judul tesis dapat ditetapkan di awal semester, penetapan waktu pelaksanaan PKL agar tidak menghambat kelancaran studi, muatan kuliah berbasis kebutuhan lapangan, tugas-tugas untuk setiap mata kuliah dirancang secara terintegrasi dan diarahkan berbasis penerapan IT dan jaringan. Selanjutnya, mahasiswa juga mengusulkan agar perkuliahan diarahkan berbasis pemecahan masalah atau kasus administrasi pendidikan dan pengembangan inovasi penyelenggaraan administrasi pendidikan, durasi PKL perlu ditambah (satu minggu tidak cukup) khususnya jika dikaitkan

dengan tuntutan KKNi unsur penyelesaian masalah administrasi pendidikan dengan pendekatan berbagai sudut pandang ilmu.

Saran lainnya meliputi perlunya prodi MAP memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan akademik. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan bahwa perlu adanya kebijakan yang stabil paling tidak kebijakan atau aturan yang diberlakukan bagi mahasiswa pada angkatan tertentu adalah tidak berubah hingga akhir studinya dan jika ada perubahan kebijakan maka kebijakan yang baru diberlakukan kepada mahasiswa angkatan berikutnya. Selanjutnya, prodi MAP melaksanakan sistem penjaminan mutu, melaksanakan pelatihan tentang administrasi pendidikan dengan tema-tema tertentu seperti tentang penggunaan dana pendidikan, serta memiliki jurnal ilmiah sendiri untuk memfasilitasi pengembangan karya ilmiah para mahasiswanya. Terakhir, terdapat alumni yang mengusulkan untuk mata kuliah tertentu perlu diampu oleh dosen dengan latar belakang bidang ilmu administrasi pendidikan dan agar dalam program PKL mahasiswa dihadapkan secara langsung dengan masalah administrasi pendidikan.

PENUTUP

Berdasar data hasil penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa alumni program studi Magister Administrasi Pendidikan (prodi MAP) memiliki kualifikasi yang memenuhi standar dalam bidang ilmu administrasi pendidikan. Hal ini, antara lain ditunjukkan diterimanya para alumni tersebut dalam dunia kerja, khususnya di bidang administrasi pendidikan. Sebaran posisi pekerjaan para alumni prodi MAP adalah pada tiga posisi utama, yaitu sebagai pemimpin, tenaga pendidik, dan sebagai tenaga kependidikan dalam lembaga kependidikan. Sebagian kecil di antaranya, berposisi sebagai pengawas dalam bidang pendidikan. Kinerja alumni prodi MAP, dibandingkan dengan sebelum lulus dari prodi ini secara umum masih sama, yaitu melakukan pekerjaan yang bersifat rutin. Namun demikian, para alumni tersebut memiliki tekad untuk mengubah kualitas kinerjanya, antara lain melakukan inovasi-inovasi strategi dan metode dalam melakukan pekerjaan, mencoba meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya, serta berusaha menerapkan sistem informasi manajemen dalam pekerjaannya dan mengimplementasikan berbagai teori yang didapat selama berkuliah di instansi tempat bekerjanya.

Dalam rangka turut bertanggung jawab terhadap pengembangan prodi MAP, para alumni prodi tersebut menyampaikan sejumlah saran. Saran-saran tersebut secara umum berkenaan dengan perbaikan kurikulum pendidikan, kualitas fasilitas dan layanan kemahasiswaan, serta

mandasarkan proses pembelajaran pada kebutuhan masyarakat, penggunaan IT dan jaringan, dan pada isu-isu pendidikan inovatif.

Rekomendasi

Rasionalisasi: Dunia pembelajaran di bidang administrasi pendidikan adalah bersifat dinamis. Dinamika tersebut datang dari dua sisi, sisi pengguna dan sisi instrumen pendukungnya. Pengguna administrasi pendidikan antara lain dipengaruhi faktor kesibukan masyarakat, instrumen pembelajaran yang dimiliki masyarakat, serta sifat pekerjaan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat pengguna alumni prodi Magister Administrasi Pendidikan (prodi MAP) maupun masyarakat yang menjadi mahasiswa pada prodi tersebut. Di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penghasil berbagai teknologi penyelenggaraan beserta peralatannya juga secara dinamis terus berkembang. Seiring dengan itu, penyelenggaraan prodi MAP juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Seiring dengan rasionalisasi di atas dan berbagai masukan para alumni prodi MAP terkait dengan upaya pengembangan kurikulum dan upaya pembekalan calon alumni dengan kompetensi-kompetensi yang diperlukan dalam dunia kerja, maka disarankan pada prodi MAP beberapa hal berikut: (1) secara berkesinambungan mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum, (2) melakukan penyesuaian penyelenggaraan program dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, (3) secara kontinyu menyempurnakan dan mengembangkan standar-standar penyelenggaraan pendidikan, dan (4) memfasilitasi para dosen melaksanakan penelitian dengan luaran inovasi-inovasi penyelenggaraan pendidikan, serta (5) menyelenggarakan pelatihan khusus atau kuliah umum tentang dengan tema-tema khusus, seperti penggunaan dana pendidikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mataram melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah membiayai kegiatan penelitian ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan (prodi MAP) dan Program Pascasarjana Unram yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian ini, serta kepada seluruh alumni prodi MAP yang telah berpartisipasi memberikan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. & Clark, V. L. P., (2007). *Mixed Methods Research*. USA: Sage Publications, Inc., 76–77.

- Kompri (2015). *Manajemen Pendidikan 1*. Bandung: Alfabeta.
- Moekijat. 2005. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, cetakan ke-9. Bandung: Mandar Maju.
- Perpres RI nomor 8 (2012). *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Deputi bidang kesejahteraan rakyat, Sekretaris Kabinet.
- Prihatin, E. (2014). *Teori Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan dan Kuncoro E. A. (2011). *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis*, Bandung: CV Alfabeta, 20-22.
- Suharsaputra, U. (2012). *Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 82-84, 161.
- Suharsaputra, U. (2013). *Administrasi Pendidikan*, edisi revisi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Terry, G., R dan Rue, L., W., (2013). *Dasar-dasar Manajemen, terjemahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zakiyudin, A. 2012. *Sistem Informasi Manajemen*, Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.